# BAB I
# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Konflik berasal dari bahasa latin *conflictus* yang memiliki makna tabrakan atau bentrokan. Menurut Stephen P. Robbins di dalam bukunya yang berjudul *Organizational Behavior*, konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi disebut *The Conflict Paradoks* yang merupakan pandangan konflik memiliki dua sisi (Robbins & Judge, 2009). Konflik menurut Hocker dan Wilmor adalah sebuah ekspresi pertentangan yang terjadi pada setidaknya dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, memiliki sumber penghasilan serta terdapat campur tangan pihak lain dalam mencapai kepentingan masing-masing pihak (Hocker & Wilmot, 2001).

Konflik biasanya dipicu oleh beberapa faktor baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor yang paling sering memicu terjadinya sebuah konflik ini adalah keinginan mempertahankan sesuatu, baik berupa pendapat, wilayah, bahkan mempertahankan sebuah kekuasaan. Selain itu, mempertahankan suatu kelompok dengan ‘membersihkan’ kelompok lain juga dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Sedangkan untuk faktor dari luar, biasanya dapat terjadi akibat adanya pihak ketiga yang mengadu domba kedua pihak lain untuk bertikai. Hal ini pun terjadi karena pihak tersebut memiliki suatu kepentingan yang hanya bias didapatkan apabila terjadinya sebuah konflik antara dua pihak tersebut dan membuat salah satu pihak mengalami kekalahan.

Konflik merupakan suatu peristiwa yang pasti atau sedang dialami oleh beberapa negara di dunia. Hal tersebut biasanya dipicu oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. faktor eksternal merupakan sebuah faktor yang berasal dari luar negara tersebut. Faktor tersebut biasanya datang dari pihak lain diluar negara yang bertikai. Hal tersebut mengakibatkan meluasnya konflik karena.pihak-pihak yang

terlibat jumlahnya lebih banyak dan berasal tidak hanya dari daerah yang bertikai saja. Sebaliknya, Faktor internal ini berasal dari dalam negara tersebut yang biasanya meliputi situasi politik, ekonomi, hak-hak warga, bahkan pertikaian etnis dan lainnya. Salah satu contoh konflik etnis yang terjadi adalah konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar.

Konflik yang melibatkan etnis Rohingya ini telah berlangsung sejak 1800 ketika Myanmar masih dijajah oleh pemerintah Inggris. Pada tahun-tahun selanjutnya masalah kembali pecah ketika kaum Rohingya sebanyak ini hendak mendaftarkan kewarganegaraannya. Kala itu, pemerintah Burma menolak permohonan yang diajukan oleh kelompok Rohingya. Oleh karena hal tersebut, pada saat itu 200.000 warga etnis Rohingya memutuskan untuk berpindah ke Negara Bangladesh yang memang secara geografis terletak dekat dengan Myanmar. Kepergian masyarakat Rohingya ke Bangladesh secara massal ini juga dipicu oleh kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan. Dengan perginya masyarakat etnis Rohingya tadi semakin membuat pemerintah Myanmar beserta warganya menganggap etnis tersebut merupakan etnis illegal.

Konflik antara muslim Rohingya dengan Pemerintah Myanmar ini akhirnya kembali pecah pada tahun 2012. Menurut data *Human Rights Watch* yang dikutip dari detik.com, pada tahun 2012 sebanyak 200 jiwa dari total 140.000 jumlah warga Rohingnya dipaksa oleh sebuah kelompok ekstremis untuk menempati kamp-kamp yang sangat tidak layak dihuni oleh manusia. Pada tahun yang sama, lahir kelompok ekstremis 969 atau yang biasa disebut SKUAD 969. Berbagai konflik yang terkait dengan kaum muslim Rohingya ternyata tidak hanya sampai disitu. Menurut data yang diterbitkan oleh *Medecins Sans Frontieres* yang dikutip dari laman BBC News, bermigrasi ke Bangladesh. Sementara untuk jumlah pengungsi yang tewas tercatat sebanyak 6.700 muslim rohingya tewas dikarenakan konflik ini (BBC Indonesia, 2017).

Konflik yang terjadi antara muslim Rohingya dengan militer Myanmar ini telah memakan banyak korban. Perempuan dan anak-anak tercatat sebagai korban terbanyak dalam konflik ini. Perempuan muslim Rohingya mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, penyekapan bahkan pelecehan seksual berupa pemerkosaan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan Rohingya ini, umunya dilakukan oleh para Militer Myanmar. Untuk menghindari kekerasan tersebut, perempuan Muslim Rohingya bersama dengan masyarakat muslim rohingya yang lain mengungsi ke negara-negara lain, seperti Bangladesh. Awal tahun 2018 tercatat dari jumlah pengungsi rohingya yang berjumlah 655,000 jiwa, sebanyak 60 persen dari jumlah pengungsi Rohingya merupakan perempuan (Akter, 2018).

Dari konflik yang terjadi, perempuan selalu menjadi pihak yang mengalami kerugian yang cukup besar, baik moril maupun materiil. Perempuan merupakan salah satu pihak yang kerap menjadi sasaran kekerasan bahkan menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak lawan. Namun, dibalik segala bentuk penindasan tersebut, perempuan ternyata juga mampu menjadi seorang yang berperan sebagai aktor dalam sebuah resolusi konflik. Seorang perempuan juga mampu untuk bertindak sebagai seorang aktor dalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan terutama dalam hal upaya resolusi konflik.

Untuk menyelesaikan suatu konflik, biasanya diperlukan adanya sebuah resolusi konflik. Resolusi Konflik merupakan suatu kemampuan penyelesaian suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga merupakan suatu aspek penting dalam sebuah pembangunan moral dan sosial. Untuk melaksanakan resolusi konflik dibutuhkan keterampilan dalam bernegosiasi serta melakukan kompromi dengan pihak terkait (Mindes, 2006). Selain itu, resolusi konflik ini juga harus dilakukan agar keamanan serta perdamaian global tetap terjaga.

Namun, dibalik peran perempuan yang selalu menjadi korban dalam setiap terjadinya konflik, perempuan juga mampu menjadi aktor dalam upaya resolusi konflik. Salah satu contoh perempuan yang berhasil menjadi aktor perdamaian khususnya di Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi yang merupakan perempuan pemenang Nobel perdamaian di tahun 1991 yang juga merupakan seorang politikus yang terkenal di Negara Tanah Emas tersebut. Melihat kesuksesan dari Aung San Suu Kyi dalam hal ikut serta dalam proses perdamaian bahkan menciptakan perdamaian ini menjadi tolak ukur bagi penulis dalam menemukan peran dari perempuan dalam hal resolusi konflik khususnya dalan konflik yang terjadi pada kelompok Rohingya di Myanmar.

Selain keberhasilan Aung San Suu Kyi dalam menciptakan perdamaian, kesuksesan lain yang didapat perempuan dalam menjadi agen perdamaian dan memiliki peran penting di suatu konflik dapat dilihat dari kelompok perempuan yang berada di Negara bagian Karen. Beberapa contoh kesuksesan tersebut membuat penulis ingin mengetahui adanya peran dari berbagai individu maupun tersebut pada konflik Rohingya. Apakah pihak-pihak perempuan yang menjadi aktor perdamaian dan resolusi konflik pada kasus lain memiliki peran dalam resolusi konflik Rohingya, adanya aktor baru yang dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat setempat atau justru minimnya peran perempuan terhadap kasus tersebut.

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu "**Bagaimana peran perempuan dalam resolusi konflik Rohingya di Myanmar?"**

## Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan kerangka pemikiran berupa *Theory of Political*

*Opportunities Structure* atau Teori Struktur Kesempatan Politik oleh Eisinger. Dalam teori tersebut, Eisinger mengemukakan beberapa rumusan yang digunakan untuk menganalisis sebab-sebab efektivitas menyampaikan sikap protes politik. Selain hal tersebut, McAdam dan Tarrow juga menjelaskan apabila masalah terkait efektivitas gerakan juga terletak pada pusat elaborasi teori *political opportunities* ini, dimana objek sentral merupakan topik pembuka dan kerentanan sistem politik untuk melakukan mobilisasi. Dalam perspektif ini, kondisi yang paling menguntungkan untuk melakukan klaim gerakan ditentukan di depan sistem politik terbuka, hubungan yang tidak konstan antara berbagai pihak serta hasil pemilu yang juga tidak stabil, konflik yang terjadi di dalam elit dan sistem yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang efektif (Caruso, 2015).

Teori kesempatan politik ini menjanjikan sebuah sarana untuk memprediksi berbagai perbedaan dalam hal perioditas, gaya serta isi klaim aktivis dari waktu ke waktu dan berbagai macam konteks institusional. Penjelasan menekankan interaksi dari berbagai upaya aktivis dan politik institusional yang lebih utama. Premis yang mendasari pendekatan ini merupakan pendekatan yang hampir tidak sepenuhnya baru bagi dunia politik atau sosiologi, namun penerapannya yang sistematis terhadap suatu analisis politik protes melambangkan suatu langkah penting menuju koherensi yang lebih besar dan komparabilitas dalam memahami gerakan protes sosial.

Eisinger menggunakan mekanisme ini pertama kalinya dengan mengadopsi pandangan dari Tocqueville yang mengatakan bahwa "*sebuah revolusi tidak akan terjadi ketika sebuah kelompok masyarakat tertentu berada dalam kondisi tertekan*" untuk menjelaskan sebab terjadinya kerusuhan di Amerika pada tahun 1960-an. Namun, aksi kolektif yang dapat disebut sebagai sebuah gerakan revolusi ini muncul ke permukaan ketika sebuah sistem politik dan ekonomi yang sebelumnya tertutup mengalami sebuah perubahan menjadi

terbuka terhadap publik. Melalui hal tersebut, McAdam dan Tarrow menambahkan beberapa variabel lain selain yang telah dikemukakan oleh Eisinger sebelumnya. Menurut McAdam dan Tarrow terdapat beberapa variabel yang terdapat di dalam teori struktur kesempatan politik atau *political opportunities* ini.

Yang pertama adalah suatu gerakan sosial muncul apabila tingkat akses terhadap suatu lembaga politik mengalami keterbukaan. Apabila variabel ini dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh penulis, hal ini berarti tingkat partisipasi perempuan atau gerakan perempuan ini dapat muncul atau semakin kuat ketika terbukanya akses mereka ke berbagai lembaga politik di Negara tersebut. Artinya, apabila suatu individu atau grup yang membawa kepentingan dalam hal resolusi konflik Rohingya di Myanmar ini memiliki akses yang kuat dalam lembaga politik Negara tersebut, maka semakin mudah pula terwujudnya sebuah resolusi konflik. Yang kedua adalah ketika keseimbangan politik sedang bercabang sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk. Jika variabel tersebut dibenturkan dengan kasus yang terjadi di Rohingya, artinya perempuan dapat memiliki kesempatan untuk menjadi aktor dalam resolusi konflik dengan cara masuk dan memperkuat sistem politik yang sedang tidak stabil tersebut dengan menciptakan suatu keseimbangan di dalamnya.

Yang ketiga adalah ketika para elit politik mengalami suatu konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para agen perubahan sebagai suatu kesempatan. Dalam variabel ini perempuan dapat mempergunakan momentum tersebut sebagai kesempatan mereka untuk menciptakan sebuah perubahan. Salah satunya dengan melibatkan dirinya sebagai aktor dalam menciptakan suatu resolusi pada konflik Rohingya di Myanmar. Artinya, perempuan dapat masuk serta mempergunakan momentum tersebut sebagai satu kesempatan mereka untuk mewujudkan satu resolusi konflik bagi konflik

Rohingya. Variabel terakhir adalah ketika para agen perubahan melakukan penggalangan dukungan para elit yang berada di dalam suatu sistem untuk melakukan perubahan. Dalam kasus ini, nantinya dapat dilihat tingkat partisipasi yang dilakukan perempuan dalam melakukan sebuah perubahan berupa perdamaian atau resolusi konflik bagi kelompok Rohingya dan pihak lainnya.

**Hipotesa**

Peran perempuan dalam resolusi konflik di Myanmar adalah sebagai korban dan agen perubahan yang berlandaskan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000.

**Tujuan Penelitian**

Penulis tertarik mengangkat topik ini karena penulis ingin mengulik lebih dalam lagi peran perempuan yang tidak hanya menjadi korban dari suatu konflik, namun juga mampu menjadi agen perubahan dalam proses perdamaian konflik tersebut.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini merupakan metode ini menggunakan teknik mengumpulkan data, menganalisis serta menginterpretasikannya (Suryana, 1995). Untuk menambah data dari pembahasan ini, penulis juga mengambil data dari berbagai media, baik itu media cetak seperti buku, jurnal, Koran maupun berbagai artikel dan juga media elektronik seperti berbagai media cetak elektronik, jurnal online dan sebagainya.

**Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil contoh kasus atau konflik pada kelompok Rohingya dan beberapa kasus yang terjadi di Myanmar.

**Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: Isi dan Pembahasan. Sejarah konflik Rohingya di Myanmar

Bab ini berisi tentang bagaimana awal mula masuknya kelompok Rohingya ke Myanmar serta terjadinya konflik Rohingya, serta respon pemerintah untuk konflik tersebut.

Bab III: Perempuan dalam Konflik dan Resolusi Konflik

Pada bab ini akan terdapat definisi konflik dan resolusi konflik serta menjabarkan Resolusi dewan keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan yang menjadi kerangka pemikiran serta memberikan gambaran tentang bagaimana resolusi dewan keamanan PBB ini dapat terbentuk serta perbandingan peran perempuan terhadap konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Myanmar.

BAB IV: Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Rohingya di Myanmar

Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana posisi perempuan sebagai korban dalam konflik tersebut namun disisi lain perempuan juga mampu memiliki andil untuk menjadi seorang agen perdamaian untuk mewujudkan suatu resolusi konflik. Selain itu, pada bab ini penulis akan melakukan pengaplikasian teori yang digunakan dengan kasus yang diangkat sebagai topik bahasan skripsi.

BAB V: Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan seluruh isi materi penulisan ini yang merupakan rangkuman dari beberapa bab sebelumnya.